BAB IV

ANALISA PENERAPAN KONSEP DAR AL-ISLAM DAN DAR AL-HARB DALAM TATA POLITIK NEGARA MODERN

Dengan makin gencarnya seruan untuk hidup lebih islami, yang dalam menjelang abad XXI ini di antaranya ditandai dengan bangkitnya kembali cita-cita ke negaraan Islam. Untuk itu pemahaman yang benar akan adanya beberapa istilah di sekitar politik Islam mutlak adanya.

Pemahaman yang benar tersebut pada satu sisi jelas akan mempermudah pembahasan dan pemecahan masalah, tetapi juga untuk menarik benang merah dari beberapa istilah yang sepadan, misalnya: Khilafah, Daulah Islamiyah dan Negara Islam.

Untuk sampai pada pemahaman tertentu mengenai politik Islam, gerakan-gerakan dan perubahan yang dipersepsikan dalam istilah-istilah Islam, pertama-tama kita harus mencoba memahami diskursus bahasa politik Islam di kalangan umat Islam.

Sebagaimana wacana mutakhir aspek-aspek politik Islam membela umat Islam menjadi dua kubu, kubu yang berpikir jernih dan kubuh yang beremosi tulus terlalu berhati-hati dalam memandang warisan politik Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka cenderung memperlakukannya sebagai sesuatu yang sakral, sementara mereka yang berpikir jernih tidak begitu saja menerima warisan tersebut. Di bawah sinar al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka mencoba kembali untuk dapat diterapkan dengan tepat pada masa kini.

Upaya mengakhiri persoalan dan perangkap emosi tersebut sudah menjadi kebutuhan mutlak. Umat Islam sekarang harus mengkritisi warisan Islam, tanpa menanggalkan komitmen mutlak pada identitas yang telah membentuknya. Namun pada saat yang sama juga tidak memperlakukannya sebagai sesuatu yang suci, sebagaimana sering diungkapkan dalam qaul ulama:

المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الأصلح.

"Memelihara yang lama yang baik, dan mencari yang baru yang lebih baik."

Selanjutnya Muhammad Husain Haekal sebagaimana yang dikutip oleh Munawir Sadzali, dalam bukunya "Islam Dan Tata Negara", bahwa Islam itu tidak memiliki sistem kenegaraan, tetapi dalam agama Islam terdapat seperangkat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara (Munawir Sadzali, 1989: 2).

Dengan demikian, Islam memberikan kebebasan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih dan atau menetapkan satu tata aturan politik yang dipandang paling sesuai, dan dengan tetap memperhatikan pencampaian kemaslahatan, sebagaimana tersirat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (t.t.: 69), berikut:

كان النبي صلعم يعطى امراء الجيوش والسرايا حق الحكم بما يرون فيه المصلحة يقول للواحد منهم اذا حاصرت اهل حصن فارادوك على ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لاتدرى اتصيب فيهم حكم الله ام لا.

"Nabi Saw. memberi kepada panglima-panglima tentara dan panglima-panglima sariyah (pasukan-pasukan kecil) hak memutuskan suara dengan apa yang mereka pandang maslahah. Kepada seorang di antara mereka Nabi bersabda: Apabila engkau mengepung penduduk suatu benteng, lalu mereka menginginkan engkau memutuskan perkara dengan hukum Allah, maka janganlah engkau memutuskan perkara dengan hukum Allah, akan tetapi putuskanlah perkara mereka dengan hukummu, karena engkau tidak mengetahui apakah engkau menemukan hukum Allah terhadap mereka ataukah tidak (karena engkau tidak mengetahui apakah keputusanmu sesuai dengan keputusan Allah atau tidak)."

Kemaslahatan merupakan tujuan dari penetapan hukum. Oleh karena itu ketetapan yang tidak memuat kemaslahatan adalah batal, sebaliknya ketentuan hukum yang menjadikan maslahah sebagai asas dan tujuan adalah sah. Dalam masalah ini menarik untuk menyimak pernyataan ulama yang dinukilkan dalam bukunya T.M. Hasbi as-Shiddieqy (1971: 331) menyatakan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اينما وجدت المصلحة فثم شرع الله.

"Di mana saja didapatkan maslahah, maka di situlah agama Allah."

Dalam menghadapi berbagai persoalan yang selalu muncul, sebagai satu sistem kepercayaan, Islam diyakini tidak pernah kehilangan signifikansinya dalam menghadapi krisis eksternal maupun krisis internal yang menghadang kaum muslimin, karena ia mampu menawarkan alternatif terbaik.

Selanjutnya, masalah kenegaraan adalah masalah furu'iyah, untuk itu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, kami akan berpijak pada kaidah ushul, yaitu:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.

"Hukum itu berkisar pada suatu illat, pada waktu adanya illat atau pada waktu tidak adanya suatu illat."

Dan berikut pendapat Yusuf Qordhawi (t.t.: 22) tentang kemampuan syari'at Islam dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman, di mana beliau menyatakan bahwa syari'at Islam itu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الثبات فى الا صول والاهداف والمرونة فىالفروع والوسائل.

"Kokoh dalam persoalan pokok dan tujuan, serta elastis dalam persoalan furu' dan wasa'il (komplemen)."

Kemudian untuk memudahkan dalam menganalisa persoalan yang penyusun kemukakan, maka dalam pembahasannya akan penyusun bagi dalam dua sub berikut.

A. Analisa Konsepsional

Dilihat dari kacamata negara bangsa (nation state) maka konsep Dar al-Islam dapat dikatakan sebagai negara supranasional atau negara universal, yakni negara yang tidak dapat membatasi ruang lingkup kegiatannya - yang menyeluruh terhadap kehidupan manusia (Abu A'la Al-Maududi: 1994: 166) - negara yang merangkum berbagai suku bangsa menjadi satu kesatuan sosial politik di bawah satu aturan hukum dan pemerintahan (Madjid Khadduri, 1961: 37).

Menurut sifatnya negara universal tidak mengakui negara lain, kecuali barangkali sebagai kesediaan untuk tunduk padanya (Madjid Khadduri, 1961: 37). Karena Dar al-Islam adalah satu yang wilayahnya meliputi seluruh penjuru Dar al-Islam (Hasjmy, 1984: 285)

Dalam konteks negara modern, konsep tersebut jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berlawanan dengan sistem interaksi internasional modern. Sistem interaksi internasional modern yang diikuti oleh keluarga internasional - minimal dalam waktu dekat - kelihatannya sulit memberi kemungkinan bagi usaha merealisasikan negara universal. Sebab hal itu akan bertentangan dengan asas kedaulatan dan asas penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa.

Dalam hubungan luar negeri negara-negara modern, kedaulatan tiap-tiap negara menjadi sejajar. Karenanya penundukan satu negara atas yang lain jelas tidak dapat diterima. Hal ini berbeda dengan kedaulatan ke dalam, yang berarti pemerintah adalah badan tertinggi dalam sistem suatu negara, maka kedaulatan ke luar berarti bahwa pemerintah-pemerintah adalah tertinggi dalam sistem internasioanl.

Di samping itu, kekuatan-kekuatan supranasioanl, seperti agama- agama universal dan lain-lain kosmopolitan humanisme, hubungan perseorangan, lembaga-lembaga dan organisasi yang mengikat bersama perseorangan-perseorangan yang melewati batas-batas nasioanl, sekarang ini jauh lebih lemah daripada kekuatan yang mempersatukan orang-orang dalam batas-batas tertentu dan memisahkan mereka dari kemanusiaan yang lain.

Saat ini nasionalisme telah diterima secara umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pengatur dan pengikat negara modern, yaitu negara bangsa, bahkan negara-negara yang mendakwakan dirinya sebagai negara Islam sekalipun tidak dapat lepas dari asas ini. Hanya saja nasionalisme bagi orang Islam atau negara Islam itu bercorak khas.

Bahwa tidak satu pun dari bangsa Islam telah mengembangkan perasaan nasional, yang berarti kepatuhan atau perhatian terhadap suatu umat yang melampui batas-batas Islam. Sehingga nasionalisme untuk orang-orang Islam di mana-mana adalah nasionalisme Islam. Bahkan apabila nation tadi bukan merupakan lambang kepercayaan, nation tadi merupakan tempat kediaman mukmin (Wilfred Contwell, Jilid I, 1962: hal. 93).

Dengan demikian, dalam negara modern Islam sudah tidak menjadi lagi ideologi. Di hadapan negara modern, Islam lebih banyak melakukan fungsi solidaritas daripada fungsi ideologi, yakni memperkuat identitas nasional dan memperkecil perbedaan-perbedaan yang berdasarkan kelas kemasyarakatan setempat, regional dan etnosentris pada kebanyakan Dar al-Islam. Karena walaupun kosmopolitan Islam masih diakui, namun tidak ada usaha-usaha untuk menghapuskan kedaulatan yang ada dan menggantikannya dengan menegakkan kekhalifahan kembali.

Kenyataan tersebut masih diperkuat oleh sifat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum internasional. Di mana salah satu tugas hukum internasional adalah untuk melindungi kedaulatan tersebut, bukannya mengendalikan aspirasi-aspirasi kekuasaan masing-masing bangsa.

Aturan hukum internsional malahan menjaga, agar posisi kekuasaan masing-masing bangsa tidak dirugikan oleh kewajiban hukum apapun yang mereka bebankan kepada diri mereka sendiri, dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa yang lain. Penundukan satu bangsa atau negara kepada negara universal pada gilirannya akan menghilangkan kedaulatan dan kebebasan menentukan nasib sendiri.

Dan saat ini, nasionalitas telah menjadi pengikat hubungan antar individu dan negara. Dengan nasionalitas, individu dapat menikmati perlindungan dan kemanfaatan dari hukum internasional. Nasionalitas juga berfungsi sebagai simbol identifikasi individu dalam kaitannya dengan negara tertentu.

Demikian pula adanya doktrin yang menggariskan bahwa semua negara Islam (negara dengan umat Islam sebagai mayoritas) yang berbilang jumlahnya, saat ini ada, dipandang sebagai satu negara karena diatur dengan satu undang-undang, yaitu syari'at Islam, dengan konsekuensi kebebasan warga negara masing-masing untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasuki wilayah negara lain, sekaligus mendapatkan perlindungan sulit untuk diwujudkan.

Kesulitan itu timbul, disamping karena dasar pijakan yang berbeda, juga karena hal itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Dengan alasan itulah , maka setiap negara dapat melakukan pengusiran kepada setiap orang yang memasuki wilayahnya dengan cara melanggar hukum atau melanggar syarat-syarat izin masuk (Huala Adolf, Cet. I,1991: 208).

Keberatan penerapannya akan lebih sulit lagi bila dikaitkan dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad yang menyatakan, bahwa orang Islam yang menetap dalam wilayah negeri non-Muslim (Dar al-Harb) kedudukannya sama dengan penduduk Muslim yang menetap dalam negeri Islam (Dar al-Islam), yakni akan mendapatkan jaminan bagi keselamatan jiwa dan hartanya dari negeri Islam. Hal itu tentunya akan bertentangan dengan perinsip-perinsip non-intervensi dari negara-negara modern.

B. Kemungkinan Penerapan Konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb Dalam Konteks Negara Modern

Malise Ruthven, seorang sarjana yang banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengamati Islam dalam zaman modern ini meramalkan sebagaimana yang dikutip oleh Nurcholis Madjid (Cet. II, 1992: 484), bahwa walaupun saat ini Islam masih menjadi agenda politik dunia, ia berharap bahwa suatu saat nanti kaum Muslimin akan terbebas dari berbagai konflik politik, dan akan membangun kembali tema politik keagamaannya.

Selanjutnya beliau menyatakan, jika kaum Muslimin sanggup melepaskan kekakuannya, yang membuat aktifitas kontemporernya mengalami ketandusan kultural, maka Islam akan mampu membuktikan dirinya sebagai yang paling sesuai dan cocok dengan saintific.

Sebelum kami memulai pembahasan dalam tema ini, sekali lagi kami ingin menegaskan, bahwa: Islam pertama-tama adalah agama, yaitu ajakan akan keyakinan tertentu mengenai hubungan antara individu dan Tuhan. Dalam pada itu, ia juga merupakan sistem untuk diterapkan atau peradaban, yaitu suatu deret nilai-nilai dan model perilaku yang mesti dihormati dan memanifestasikan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari.

Secara singkat Hamed A. Rabie (1970; 59) mengungkapkan, bahwa fenomena Islam adalah multi dimensi, yang meliputi agama, sistem peradaban dan metode pengaturan konflik internasional sekaligus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, untuk dapat berinteraksi dalam skup Internasional, kemampuan Islam itu sangat bergantung pada kecermatan kita untuk merealisasikan empat variabel berikut ini:

1. Reformasi ideologi
2. Kemampuan memisahkan antara Islam sebagai fenomena nasional dan Islam sebagai dakwah internasional
3. Meninggalkan ketidakserasian dalam negeri
4. Pengaturan regional (Hamed A. Rabie, 1970: 47).

Saat ini model Arab sebagai skup interaksi internasional sudah tidak pada tempatnya membicarakan kembali. Situasi politik yang kita hadapi sekarang ini sangat berbeda, sehingga diperlukan adanya reformasi atau pun penyaringan terhadap warisan Islam, yaitu penyaringan terhadap beberapa prinsip atau norma Islam yang kelihatan kurang selaras dengan kondisi dan kebutuhan dunia kontemporer, atau pada struktur dalam berinteraksi dengan realita.

Pada saat kaum Muslimin dalam kesatuan sosial dan politik dalam Dar al-Islam, maka gambaran tentang umah dapat dengan mudah kita pahami. Hal itu akan sangat berbeda ketika umat Islam tersebar dan terhimpun dalam berbagai negara atau bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Dalam kehidupan politik, Islam masih merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber paling luas yang menyediakan formulasi-formulasi gagasan yang masuk akal. Dan sebagaimana yang telah ditunjukkan berulang kali oleh peristiwa yang berlangsung belakangan ini, Islam menyediakan sistem simbol untuk mobilisasi politik yang paling efektif (Bernard Lewis, Cet. I, 1994: 7).

Sisi penting lainnya dari segi signifikansi konsep Dar al-Islam pada khususnya, adalah corak Islam yang mewarnai dalam setiap gerak langkah negara dan masyarakat, berikut penggunaan institusi negara atau pemerintahan sebagai sarana memperjuangkan idealisme Islam. Sedangkan dalam Dar al-Harb adalah coraknya yang non-islami yang mewarnai dalam setiap gerak langkah negara dan masyarakat.

Dan telah kami kemukakan dalam pembahasan terdahulu, bahwa negara-negara modern didirikan atas nasionalisme. Menurut pengamatan Han Marganthou, nasionalisme yang berkembang pada bagian akhir dari abad XX ini, secara mendasar berbeda dengan apa yang disebut dengan nasionalisme pada awal pemunculannya, yang memucak pada gerakan-gerakan nasional abad XIX. Di mana nasionalisme abad XIX berusaha membebaskan bangsa-bangsa dari dominasi asing, dan memberi kepada bangsa-bangsa tersebut wujud dari nasionalnya sendiri. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasionalisme sekarang, yang sebenarnya adalah universalisme nasional, yaitu paham yang menuntut bagi sutau bangsa dan suatu negara, hak untuk menggunakan nilai-nilai dan ukuran dasarnya sendiri terhadap semua bangsa (Han J. Morgenthou, 1991: 6)

Sehingga penggunaan istilah Dar al-Harb pada saat ini akan dapat membawa citra dan akibat yang kurang baik bagi dunia Islam itu sendiri, karena sifat antagonis yang melekat padanya, hingga kemungkinan besar dunia Islam (khususnya negara Islam) akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan masyarakat internasional yang mendambakan perdamaian abadi. Di samping sebagai suatu kenyataan pada saat ini berbagai negara telah terikat dengan perjanjian internasional. Maka untuk menyebut Dar al-Harb sebaiknya digunakan istilah yang telah lazim dipakai dalam hubungan internasional, misalnya blok Barat, blok Sosialis atau lainnya.

Untuk itu negara-negara Islam kiranya lebih tepat untuk memunculkan dan menggunakan norma-norma politik Islam dalam hubungan internasionalnya, khususnya dalam rangka mengimbangi universalisme nasional dari bangsa lain, agar kita tidak kehilangan identitas. Karena adanya keunggulan-keunggulan internal yang dimiliki oleh politik Islam, sebagaimana yang ditetapkan oleh Hamed A. Rabie

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1970: 15):

> Sejarah Islam sebenarnya adalah sejarah pembaharuan, orang yang mengikuti sejarah pemikiran Islam, akan meyakini bahwa dalam masa kemunduran dan kejumudan sekalipun, pemikiran Islam selalu berorientasi ke depan. Politik Islam adalah politik tegas dan kokokh, yaitu politik yang bertitik tolak dari idealisme, keadilan dan persamaan hak.

Pada bagian lain, beliau juga menyatakan bahwa interaksi internasional itu lahir dari keyakinan pemikiran. Apalagi dengan adanya perubahan-perubahan ideologi dalam skup internasional, di mana kita dapati hanya Islam yang mampu menyajikan konsepsi ketiga setelah marxisme dan liberalisme Barat.

Faktor lain yang kiranya dapat menopang kiprah politik Islam dalam negara modern, adalah adanya krisis nilai yang sedang dialami oleh negara-negara modern. Sebagaimana tersebutkan di atas, bahwa dalam interaksi luar negerinya, negara-negara modern hanya memiliki satu poros yaitu poros kepentingan nasional. Yang dengan itu pemerintah bisa jadi berhak untuk menipu, berbohong atau bermusuhan dengan negara lain dalam berinteraksi, pemerintah juga boleh melupakan seluruh nilai-nilai tradisional negaranya.

Sudah barang tentu tiap negara memiliki standar sendiri-sendiri tentang apa yang dinamakan dengan kepentingan nasional. Yang didefinisikan sebagai tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dan berkesinambungan, untuk mana suatu bangsa bertindak, yang pada intinya berdasarkan kepada nilai-nilai yang dapat diangkat sebagai produk kebudayaan dan sebagai ekspresi dari rasa perpaduan nilai-nilai yang menetapkan bagi manusia apa yang mereka anggap benar dan adil.

Sepanjang sejarah pemikiran politik, manusia terus menerus mencari nilai-nilai yang tertinggi yang dapat digunakan sebagai tongkat pengukur. Akan tetapi fakta-fakta menunjukkan, bahwa teori-teori yang bertentangan yang muncul, dan menyebabkan keragu-raguan terhadap validitas nilai-nilai manapun (J. Frankel, Cet. II, 1989: 49) hal inilah yang menjadikan negara-negara modern mengalami krisis-krisis nilai.

Dalam konteks politik Islam, krisis nilai tersebut sedikit banyak akan tereliminir. Sebab dalam teori politik Islam, fungsi agama dan fungsi politik digabungkan dan diselenggarakan oleh struktur yang seragam, institusi-institusi dan jabatan-jabatan keagamaan benar-benar menjadi bagian dari negara (Bassam Tibi, 1994: 171).

Dalam Islam, juga tidak ada tempat untuk membedakan antara individu dan negara, baik dalam tingkah laku maupun keutamaan-keutamaannya. Misalnya, Islam itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak pernah membedakan adanya kewajiban untuk menepati isi suatu perjanjian yang pernah dibuat antaranya dengan pihak lain, baik oleh individu maupun negara. Semua dibimbing oleh Islam sebagai way of live bagi keduanya (Abd. Kholiq, an-Nawawi, 1963: 35).

Yang terakhir, bahwa secara esensial Islam sangat menghormati adanya homogenitas bangsa-bangsa. Ayat ke-13 dari surat al-Hujurat kiranya dapat kita jadikan pegangan, sebagai berikut:

يايها الناس انا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا... (الحجرات: ١٣)

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal." (Departemen Agama R.I., 1979: 847)

Dan pada bagian lain al-Quran juga memberitakan bahwa agaknya Allah memang tidak menghendaki adanya kesatuan mutlak di antara manusia, sebagaimana firmannya:

ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فى ما اتكم فاستبقوا الخيرات ... (المائدة: ٤٨)

"Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan (Departemen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama R.I., 1979: 168)

Dari sini jelaslah, bahwa Islam tidak memaksakan agar semua umat manusia menjadi beriman. Perbedaan dari sistem sosial dan budaya dalam bingkai taaruf kiranya justru akan memperkaya wawasan komunitas. Yang harus diperhatikan adalah agar perbedaan tidak menjadi sumber ketegangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id